

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 5 Oktober 2014

Subyek : Lapindo

Hal : 15

PEMERINTAH : LAPINDO HARUS TANGGUNG JAWAB

Untuk kesekian kalinya, pemerintah mendesak PT Lapindo Brantas Inc untuk membayar sisa ganti rugi kepada warga yang terdampak bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Lapindo seharusnya berempati terhadap penderitaan warga yang terkatung-katung menunggu ganti rugi selama delapan tahun terakhir.

”Lapindo tetap harus bertanggung jawab (terhadap) kewajibannya. Kami akan mencari cara supaya Lapindo dengan aset-aset yang ada bisa digunakan untuk melaksanakan kewajibannya, tidak lepas tangan, tidak melemparkan tanggung jawabnya kepada pemerintah,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kamis (4/12), se usai bertemu Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso di Kantor Seskab.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah tidak mungkin mengambil alih kewajiban Lapindo. Pemerintah hanya bisa membantu Lapindo lewat penjualan aset atau langkah-langkah lain guna mendapatkan dana untuk membayar ganti rugi itu.

Pemerintah masih memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada warga di luar area terdampak sebesar Rp 300 miliar. Dana sudah tersedia.

Adapun Lapindo wajib membayar ganti rugi kepada warga sebesar Rp 781 miliar dan bagi perusahaan lain yang terdampak Rp 500 miliar.

Desakan serupa pernah disampaikan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Desakan dari pemerintah itu selalu mengemuka saat kondisi tanggul lumpur jebol dan warga yang terdampak menagih ganti rugi.

Menurut Andi, harus ada solusi konkret terhadap persoalan ganti rugi warga, paling lambat tahun 2015. Penyelesaian ini menjadi prioritas pemerintah. ”Tadi saya sudah melaporkan masalahnya kepada Presiden. Instruksi Presiden, jangan lagi menunggu terlalu lama. Delapan tahun itu cukup. Tahun anggaran 2015 ini harus tuntas,” katanya.

Warga protes

Warga yang bermukim di tepi Sungai Ketapang, Sidoarjo, berunjuk rasa meminta BPLS menghentikan aliran lumpur Lapindo ke Sungai Ketapang karena banjir mulai mengancam ratusan rumah warga.

”Ini kalau hujan sedikit saja air sungai pasti langsung membanjiri rumah-rumah kami. Sekarang lihat posisi air sungai sudah sejajar dengan bibir sempadan karena pendangkalan akibat masuknya lumpur Lapindo,” ujar Asabu, Ketua RT 009 RW 011 Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin. (WHY/NIK/IDR).